

LAPORAN SWAKELOLA

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

2020



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2020
**Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan**



Reni Ahiantini
NIP. 196910181996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Renstra	5
2.2 Perjanjian Kinerja	6
2.3 Metode Pengukuran	7
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra	9
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
3.1 Sumber Daya Manusia.....	11
3.2 Sarana dan Prasarana	11
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	12
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Rencana Tahun Anggaran 2020.....	39
4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	41
4.4 Perbandingan Kinerja Organisasi.....	45
4.5 Realisasi Anggaran	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Permasalahan	50
5.2 Langkah Kedepan	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Tahun 2020, merupakan tahun pertama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 04 tertera Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan diperjelas kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat PPIJJ menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Kinerja Direktorat PPIJJ untuk tahun 2020 ini berdasarkan 4 (empat) buah sasaran strategis direktorat yaitu:

1. Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
2. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
3. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan; dan
4. Layanan Perkantoran.

Rencana Strategis Direktorat PPIJJ disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategi dan program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berikut indikator dan pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020:

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan investasi infrastruktur jalan dan jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan	4 Paket Pembiayaan	4 Paket Pembiayaan	100%
3.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	5 Laporan	5 Laporan	100%
4.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

Sumber Data: emonitoring.pu.go.id

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020 dengan realisasinya. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2020 yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*)
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran

3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
4. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran serta penyelesaian regulasi yang terkait dengan tuis Direktorat PPIJJ
5. Menyusun SOP untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan kinerja

Direktorat PPIJJ Tahun 2020 mengalami 4 (empat) kali perubahan Pagu DIPA, DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2020 tanggal 12 November 2019, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.779.000.000. Revisi Pagu DIPA pertama tanggal 2020 menjadi Rp. 18.779.000.000,- dikarenakan adanya pergantian KPPN untuk pelaksanaan KPPN. Revisi Pagu DIPA kedua tanggal 27 April 2020 menjadi Rp. Rp17.172.517.000,- dimaksudkan untuk *refocusing* anggaran guna pemenuhan anggaran penanganan COVID-19. Revisi DIPA ketiga tanggal 11 Juni 2020. Revisi DIPA ke empat tanggal 16 Juli 2020 Capaian kinerja Direktorat PPIJJ dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2020. Rencana penyerapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 93,92% berdasarkan e-monitoring online Kementerian PUPR.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2020 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan kinerja ada Direktorat PPIJJ tahun 2020 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2020. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIJJ untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPIJJ terdiri dari sub direktorat dan sub bagian sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, diantaranya:

A. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

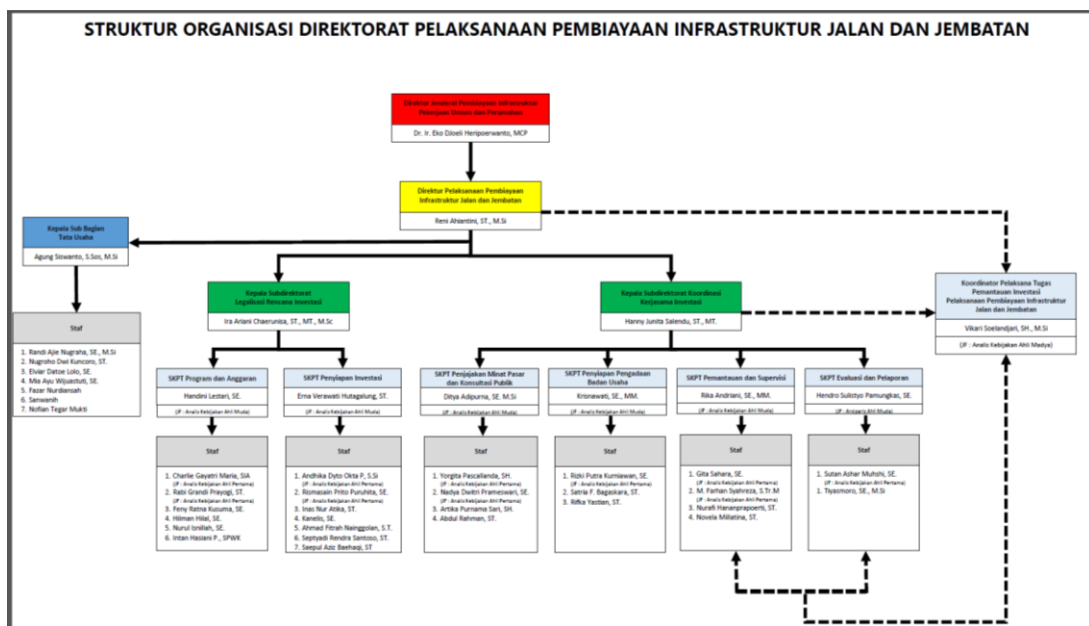
B. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise; serta
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Sub Bagian Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1.4 ISU STRATEGIS

Tahun 2020, merupakan tahun kedua Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 04 tertera Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan diperjelas kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

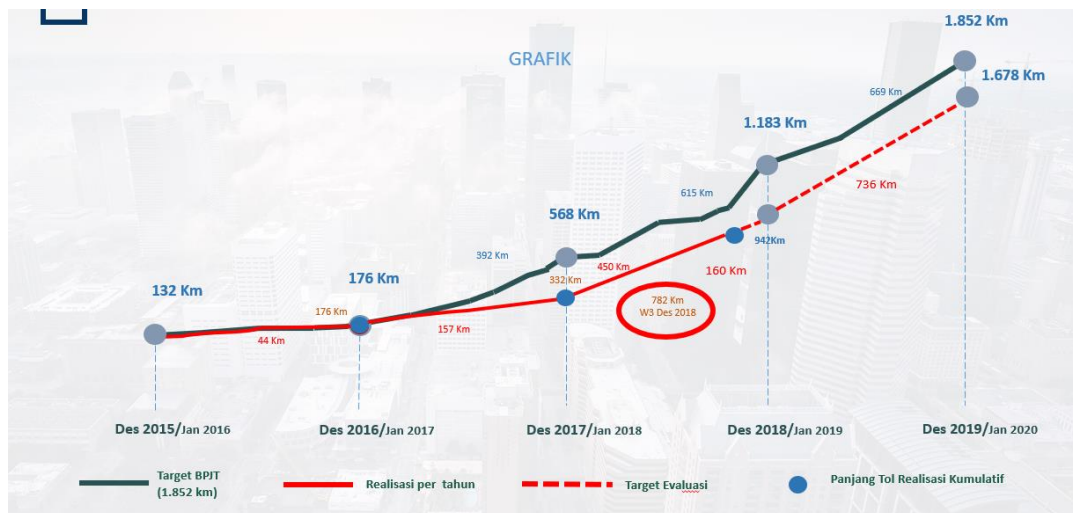
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Jumlah proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diusulkan pemerintah sudah cukup banyak, namun hal ini tidak diikuti dengan proses persiapan yang matang khususnya pada tahap *Outline Business Case* (OBC) dan *Final Business Case* (FBC) yang melibatkan pihak kedua (konsultan). Hal ini menimbulkan hambatan terhadap beberapa proyek dikarenakan *preliminary study* yang kurang komprehensif dan mendalam. Serta jika tidak disiapkan dengan baik yang berakibat pada pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran serta membengkaknya biaya sebagai akibat dari munculnya perubahan atau perbaikan terhadap rencana yang telah diusulkan sejak awal.

Masih terdapat *gap* pendanaan pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), proyeksi kebutuhan visium PUPR Tahun 2020-2024 mencapai 2,058 Triliun, APBN hanya mampu menunjang 1,191 Triliun sehingga terdapat *gap* pendanaan sebesar 867 Triliun. Sehingga diperlukan alternatif pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi *gap* pendanaan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Konsep pembiayaan infrastruktur menggunakan skema KPBU merupakan hal baru yang digunakan di Indonesia, karenanya baru beberapa sektor yang berhasil mengimplementasikan konsep tersebut. Dalam bidang infrastruktur keberhasilan baru terlihat di sektor jalan dan sumber daya air.



Gambar 2.1 Rencana dan Realisasi Jalan Tol (km)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Selama Tahun 2020, Direktorat PPIJJ memiliki perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak dua kali yaitu pada Februari 2020 dan November 2020 (Lampiran 5 & 6) dari yang awalnya PK Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 memiliki program Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Output dari program ini adalah:

1. Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
2. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
3. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
4. Layanan Perkantoran;

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Metode pengukuran kinerja Direktorat PPIJJ adalah Metode Analisa Data Kuantitatif, yaitu dengan membandingkan hasil pencapaian output akhir kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat PPIJJ. Berikut tabel satuan indikator sasaran Direktorat PPIJJ adalah:

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
1.	Penyiapan dan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	Dokumen	6 Dokumen
		Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah perusahaan dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Paket	1 Paket
		Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Paket	1 Paket

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020
2.	Pelaksanaan investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Pelaksanaan Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Paket	1 Paket
		Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Paket	1 Paket
		Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	Laporan	1 Laporan
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Paket	1 Paket
		Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.	Paket	1 Paket
3.	Pemantauan dan Evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Jumlah pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	Laporan	1 Laporan
		Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	Laporan	1 Laporan
		Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan	Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	Laporan	1 Laporan
4.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran.	Bulan Layanan	1 Bulan Layanan

Selain indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja (Renja) di atas, Direktorat PPIJJ diamanatkan untuk memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan output kegiatan Tahun Anggaran 2020, yaitu dengan memberikan himbauan pada Surat Undangan acara terkait dengan Pengarusutamaan Gender dimana peserta perempuan yang hadir dalam acara minimal 30% dari total peserta.

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020 menurut Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	1,991,581	383,920	382,472	394,183	4,696,394
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	50,244	160,000	172,870	180,158	183,372	746,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	3	3	17	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ, oleh orang 44 pegawai yang terdiri pegawai 19 laki-laki dan 24 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	21
2.	CPNS	0
3.	Honorar	10
4.	KI	15
Total		46

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020 Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol I	0
2.	Gol II	0
3.	Gol III	16
4.	Gol IV	5
Total		21

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020 Menurut Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	9
2.	Strata 1 (S1)	12
3.	SMA	0
4.	SD	0
Total		21

3.2 SARANA DAN PRASARAN

Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sarana dan Parasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
KODE UAKPB : 033.08.01.400812.000

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1.	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	buah
2.	3050104005	Filing Cabinet Besi	7	buah
3.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	5	buah
4.	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	buah
5.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	buah
6.	3050201002	Meja Kerja Kayu	34	buah
7.	3050201008	Meja Rapat	1	buah
8.	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	42	buah
9.	3050206002	Televisi	2	buah
10.	3100102001	P.C Unit	21	buah
11.	3100102003	Note Book	5	buah
12.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	buah
13.	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	buah

Sumber UPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Untuk mewujudkan kegiatan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Direktorat PPIJJ Tahun 2020 mengalami 4 (empat) kali perubahan Pagu DIPA, DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2020 tanggal 12 November 2019, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.779.000.000. Revisi Pagu DIPA pertama tanggal 2020 menjadi Rp. 18.779.000.000,- dikarenakan adanya pergantian KPPN untuk pelaksanaan KPPN. Revisi Pagu DIPA kedua tanggal 27 April 2020 menjadi Rp. Rp17.172.517.000,- dimaksudkan untuk *refocusing* anggaran guna pemenuhan anggaran penanganan COVID-19. Revisi DIPA ketiga tanggal 11 Juni 2020. Revisi DIPA ke empat tanggal 16 Juli 2020 Capaian kinerja Direktorat PPIJJ dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran tahun 2020. Rencana penyerapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 93,92% berdasarkan e-monitoring online Kementerian PUPR.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2020 yang dilakukan dengan cara/ membandingkan antara target pencapaian Direktorat PPIJJ dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktur PPIJJ dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020. Pencapaian kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Berikut ini adalah sasaran kegiatan Direktorat PPIJJ tahun 2020 yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Direktur PPIJJ dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, diantaranya:

1. Layanan Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan;
2. Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
3. Layanan perkantoran.

Berikut ini akan diuraikan sasaran kinerja / *output* dari Direktorat PPIJJ berdasarkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel tingkatan capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyiapan dan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	1 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

		Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
2.	Pelaksanaan investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.	1 Paket	1 Paket	100%
3.	Pemantauan dan Evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek	1 Laporan	1 Laporan	100%

		KPBU jalan dan jembatan.			
		Jumlah pedoman kegiatan perusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

Tabel 4.1 Tingkatan Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020

B. Sasaran 1 : Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Direktorat PPIJJ menetapkan 5 (lima) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.2 Capaian Sasaran 1 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
2.	Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap Jogja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Demak Tuban	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Ngawi Babat	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Tulungagung Kepanjen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Situbondo	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Lumajang	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek Sektor Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU	Penyusunan Dokumen Final Business Case	1 Laporan	1 Laporan	100

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
	Sektor Jalan dan Jembatan.	(FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam Bintan			
		Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Tol Maminasata	1 Laporan	1 Laporan	100
6.	Jumlah perusahaan dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Fasilitasi Perusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Paket	1 Paket	100
7.	Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Penyiapan Dukungan Pemerintah Bagi Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1 Paket	1 Paket	100

1. Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.3 Indikator kinerja jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di antaranya:

1. Menyusun Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020-2024;
2. Menyusun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.



Gambar 4.1 Kegiatan Rapat Kerja Direktorat PPIJJ

2. Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan.		
Target	Realisasi	%
6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Tabel 4.4 Indikator kinerja jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBu Sektor Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. **Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBu Jalan Tol Cilacap Jogja**

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta adalah agar memperjelas penyusunan laporan studi pendahuluan dalam hal menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan, khususnya untuk Proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta.

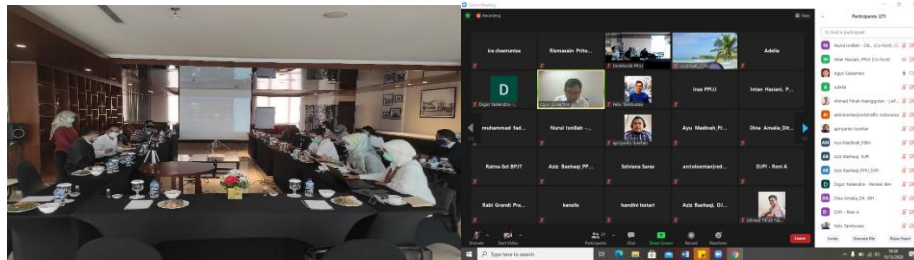


Gambar 4.2 FGD Identifikasi dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta

b. **Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBu Jalan Tol Demak Tuban**

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan di antaranya:

- a. Sebagai dasar untuk menyusun Outline Business Case (OBC).
- b. Sebagai referensi PJPK dalam melakukan evaluasi usulan proyek KPBU.
- c. Sebagai rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

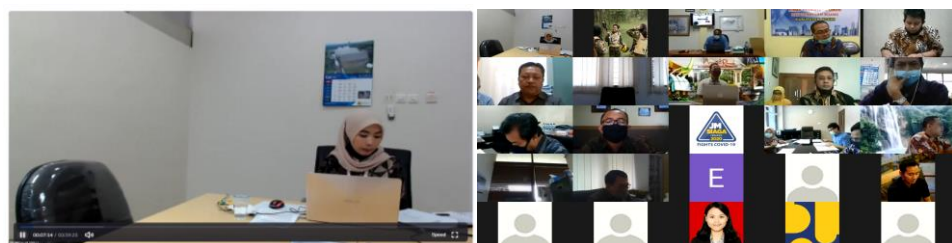


Gambar 4.3 FGD Identifikasi dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Demak-Tuban.

c. **Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Ngawi Babat**

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Ngawi-Babat adalah sebagai berikut:

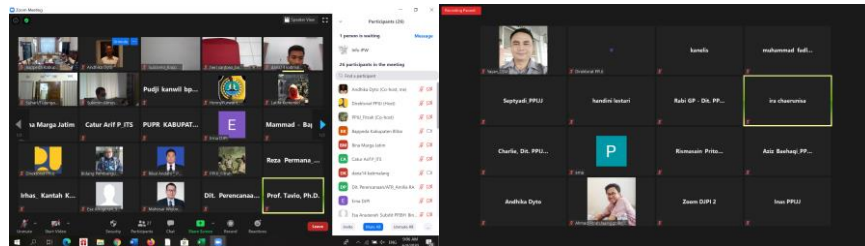
- a. Dokumen Studi Pendahuluan sebagai dokumen awal pada tahap perencanaan proyek KPBU Jalan Tol Ngawi-Babat;
- b. Dokumen Studi Pendahuluan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan dokumen prastudi kelayakan pada tahap penyiapan proyek KPBU Jalan Tol Ngawi-Babat.



Gambar 4.4 FGD Identifikasi dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Ngawi Babat

d. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Tulungagung Kapanjen

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Jalan Tol Tulungagung-Kapanjen adalah agar memperjelas penyusunan laporan studi pendahuluan dalam hal menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan, khususnya untuk Proyek Jalan Tol Tulungagung-Kapanjen.



Gambar 4.5 FGD Identifikasi dan Penilaian Risiko Proyek Jalan Tol Tulungagung Kapanjen

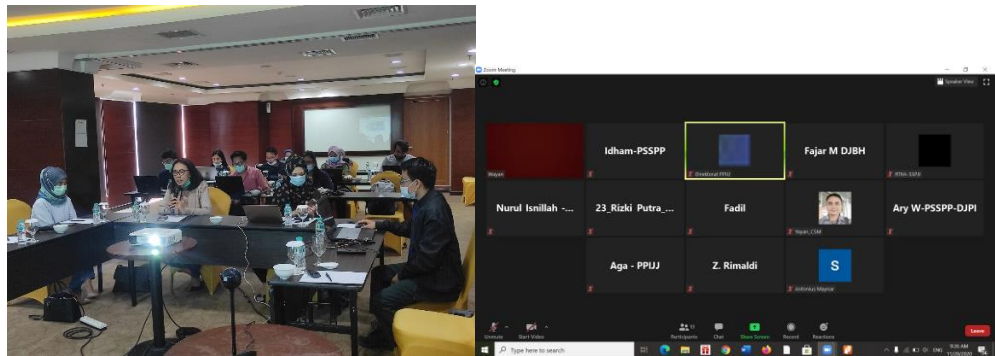
e. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Situbondo

Maksud dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek Jalan Tol Jember-Situbondo adalah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan serta manfaat suatu infrastruktur, dalam hal ini Jalan Tol Jember-Situbondo, jika dilaksanakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek Jalan Tol Jember-Situbondo di antaranya:

1. Tersedianya identifikasi proyek yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan badan usaha.
2. Tersedianya kajian terkait rencana bentuk KPBU, rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya.
3. Sebagai kajian pendukung untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPBU

4. Terpenuhiya kriteria proyek infrastruktur yang dapat diusulkan dalam Rencana KPBU dalam proses penyiapan.



Gambar 4.6 Materi Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Situbondo

f. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Lumajang

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan di antaranya:

- a. Sebagai dasar untuk menyusun Outline Business Case (OBC).
- b. Sebagai referensi PJPK dalam melakukan evaluasi usulan proyek KPBU.

3. Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.5 Indikator kinerja jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah dokumen Outline Business

Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek Sektor Jalan dan Jembatan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Jalan dan Jembatan adalah untuk melakukan kajian hukum dan kelembagaan, teknis, ekonomi dan komersial, lingkungan dan sosial, bentuk kerja sama, risiko, dan bentuk jaminan pemerintah berdasarkan data sekunder atau historikal dan data primer jika dibutuhkan dalam satu dokumen.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Jalan dan Jembatan di antaranya:

1. Dokumen OBC sebagai dokumen awal pada tahap penyiapan proyek KPBU.
2. Dokumen OBC sebagai dokumen pendukung pada dokumen permohonan pdf (DPP) kepada Kementerian Keuangan.
3. Dokumen OBC sebagai kajian pendukung untuk mendaftarkan proyek KPBU di Rencana Umum Jaringan Jalan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (kasus khusus Jembatan Muna - Buton).
4. Dokumen OBC sebagai dokumen yang menjadi acuan Badan Usaha untuk menyampaikan minat serta tanggapan pada kegiatan Market Sounding.



Gambar 4.6 Kegiatan Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek Sektor Jalan dan Jembatan

4. Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.6 Indikator kinerja jumlah Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK Pembiayaan Perumahan di Wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan**

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Project Development Facility (PDF) Proyek KPBK Jalan dan Jembatan adalah untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan bantuan penyiapan dokumen proyek KPBK dengan menyusun dokumen pra studi kelayakan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Project Development Facility (PDF) Proyek KPBK Jalan dan Jembatan yaitu tersedianya dokumen pra studi kelayakan sektor jalan dan jembatan.



Gambar 4.6 Materi Kegiatan Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan

5. Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.		
Target	Realisasi	%
2 Laporan	2 Laporan	100%

Tabel 4.7 Indikator kinerja jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam Bintan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan adalah untuk melakukan kajian hukum dan kelembagaan, teknis, ekonomi dan komersial, lingkungan dan sosial, bentuk kerja sama, risiko, dan bentuk jaminan pemerintah berdasarkan data sekunder, historikal dan data primer dalam satu dokumen.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan di antaranya:

1. Dokumen FBC sebagai dokumen penyiapan proyek KPBU.
2. Dokumen FBC sebagai dokumen pendukung pada dokumen pengadaan Badan Usaha KPBU.
3. Dokumen FBC sebagai kajian terperinci dalam menentukan nilai dukungan pemerintah yang diperlukan dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan Jalan Tol Mamminasata.
4. Dokumen FBC sebagai dokumen acuan pada penyusunan dokumen pelelangan lainnya seperti Basic Design, DPPT, dan KA-ANDAL.



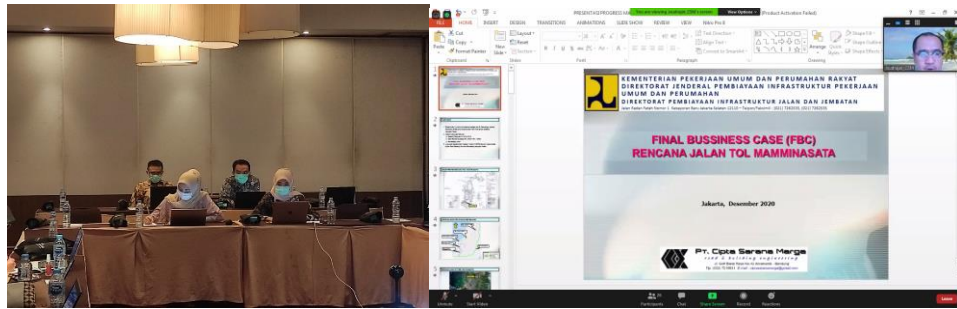
Gambar 4.7 Kegiatan FGD Identifikasi Risiko Proyek KPBU Jembatan Batam Bintan

a. Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Mamminasata

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan adalah untuk melakukan kajian hukum dan kelembagaan, teknis, ekonomi dan komersial, lingkungan dan sosial, bentuk kerja sama, risiko, dan bentuk jaminan pemerintah berdasarkan data sekunder, historikal dan data primer dalam satu dokumen.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan di antaranya:

1. Dokumen FBC sebagai dokumen penyiapan proyek KPBU.
2. Dokumen FBC sebagai dokumen pendukung pada dokumen pengadaan Badan Usaha KPBU.
3. Dokumen FBC sebagai kajian terperinci dalam menentukan nilai dukungan pemerintah yang diperlukan dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan Jalan Tol Mamminasata.
4. Dokumen FBC sebagai dokumen acuan pada penyusunan dokumen pelelangan lainnya seperti Basic Design, DPPT, dan KA-ANDAL.



Gambar 4.8 Kegiatan Konsinyasi Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBK Jalan Tol Mamminasata

6. Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 4.8 Indikator kinerja Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Pengusahaan dukungan dan jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Tujuan dari kegiatan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah agar kelayakan finansial dan efektivitas proyek KPBK Jalan dan Jembatan dapat meningkat dengan adanya fasilitas dukungan dari pemerintah, serta bankabilitas dan kelayakan kredit proyek KPBK Jalan dan Jembatan dapat meningkat dengan adanya fasilitas jaminan dari pemerintah.



Gambar 4.9 Materi Kegiatan Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

7. Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.9 Indikator kinerja Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan jembatan..

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan jembatan sebagai berikut:

a. **Penyiapan dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan jembatan.**

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penyiapan Dukungan Pemerintah Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- Maksud pelaksanaan kegiatan Penyiapan Dukungan Pemerintah Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan adalah untuk mengkaji kebutuhan dukungan pemerintah bagi proyek KPBK sektor jalan dan Jembatan;
- Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Penyiapan Dukungan Pemerintah Proyek KPBK Sektor Jalan dan Jembatan adalah untuk menghasilkan dokumen penyiapan untuk proyek KPBK atas prakarsa pemerintah dan dokumen hasil evaluasi untuk

proyek KPBU atas prakarsa badan usaha yang memuat kebutuhan dukungan pemerintah.



Gambar 4.10 Kegiatan Penyiapan dukungan pemerintah bagi proyek KPBU sektor jalan dan jembatan

C. Sasaran 2 : Pelaksanaan investasi infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai sasaran strategis 2, Direktorat PPIJJ menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Pelaksanaan Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
2.	Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
3.	Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	Penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	1 Laporan	1 Laporan	100%

4.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	Fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100%
5.	Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.	Pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.	1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.10 Capaian Sasaran 2 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1. Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.11 Indikator kinerja Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah paket pelaksanaan Market Sounding KPBU sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan

Maksud dan tujuan dalam Kegiatan Pelaksanaan Market Sounding Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan ini adalah untuk menarik minat para investor untuk ikut serta pada proyek Pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan dilelangkan dan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Badan Usaha, Lembaga Keuangan, Asosiasi, Organisasi Internasional dan Kedutaan mengenai Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sistem penjaminan infrastruktur dan

dukungan Pemerintah pada proyek KPBU, serta paparan profile proyek Market Sounding yang akan memasuki tahap pelelangan. Dari kegiatan ini dapat dilihat seberapa besar ketertarikan para calon investor yang menyatakan minat untuk berkonsultasi dan mengetahui lebih lanjut tentang proyek yang akan memasuki tahapan pelelangan.



Gambar 4.11 Kegiatan Pelaksanaan Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan

2. Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.12 Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah paket pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Maksud dalam kegiatan Fasilitasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini adalah terlaksananya

tahapan transaksi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan mempersiapkan pelaksanaan tahapan transaksi dalam KPBU.



Gambar 4.12 Kegiatan Fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan

3. Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.		
Target	Realisasi	%
1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 4.13 Indikator kinerja Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4. Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.14 Indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah paket fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Maksud dan tujuan dalam Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Financial Close Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini adalah agar tahapan transaksi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Financial Close Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan mempersiapkan pelaksanaan tahapan transaksi dalam KPBU.

5. Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.

Indikator Kinerja		
Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.		
Target	Realisasi	%
1 Paket	1 Paket	100%

Tabel 4.15 Indikator kinerja Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.

D. Sasaran 3 : Pemantauan dan Evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai sasaran strategis 3, Direktorat PPIJJ menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja beserta paket kegiatan masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4.16 Capaian Sasaran 3 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah laporan pemantauan tahapan	Pemantauan tahapan perencanaan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.			
2.	Jumlah pedoman kegiatan perusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Penyusunan pedoman kegiatan perusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Jumlah evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	Evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan	Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100%

1. Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 4.17 Indikator kinerja Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.

Maksud dari kegiatan Pemantauan Tahapan Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan adalah untuk mendapatkan kumpulan data terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, yaitu pada tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.

Tujuan dari kegiatan Pemantauan Tahapan Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan adalah:

- Mendapatkan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Mendapatkan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- Mendapatkan hasil pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.



Gambar 4.13 Kegiatan Pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan

2. Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.18 Indikator kinerja Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

- a. **Penyusunan pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegrasi dalam

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan pendahuluan yang membahas secara global rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan FGD Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegrasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- c. Melakukan persiapan pelaksanaan rapat koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegrasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- d. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegrasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan stakeholder terkait pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan finalisasi Penyusunan Laporan Swakelola kegiatan Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegrasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

3. Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 4.19 Indikator kinerja Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja diatas yaitu Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

a. **Evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan pendahuluan yang membahas secara global rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan kunjungan lapangan dan studi literatur guna melaksanakan Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan;
- c. Melaksanakan FGD Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan;
- d. Melakukan persiapan pelaksanaan rapat koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan;
- e. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan di daerah yang telah ditentukan dengan stakeholder terkait pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan finalisasi Penyusunan Laporan Swakelola kegiatan Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan.

4. Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan .		
Target	Realisasi	%
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 4.20 Indikator kinerja Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan.

5. Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Indikator Kinerja		
Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.		
Target	Realisasi	%
1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 4.21 Indikator kinerja Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

E. Sasaran 4 : Jumlah layanan perkantoran.

Untuk mencapai 3 sasaran strategis, Subbag Tata Usaha Direktorat PPIJJ menetapkan 1 (satu) indikator kinerja beserta paket kegiatan yaitu:

Tabel 4.22 Capaian Sasaran 4 Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator	Paket Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan Perkantoran.	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%

1. Jumlah layanan perkantoran.

Indikator Kinerja		
Jumlah layanan perkantoran.		
Target	Realisasi	%
12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

Tabel 4.23 Indikator kinerja Jumlah Jumlah layanan perkantoran.

4.2 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 4.24 Sandingan Target dan Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
(Status: 6 Januari 2020)

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Pagu Anggaran Direktorat PPIJJ		17.172.517.000	15.938.560.000	92,81	93,26
A	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	9.154.655.000,00	8.812.890.000	96,27	96,72

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	620.187.000	594.822.000	95,91	96,00
2	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap Jogja	617.778.000	585.999.000	94,86	95,00
3	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Demak Tuban	604.462.000	592.123.000	97,96	98,00
4	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Ngawi Babat	608.326.000	599.890.000	98,61	99,00
5	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Tulungagung Kepanjen	608.326.000	588.656.000	96,77	97,00
6	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Situbondo	510.826.000	487.423.000	95,42	97,00
7	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan Proyek KPBU Jalan Tol Jember Lumajang	510.826.000	505.100.000	98,88	99,00
8	Penyusunan Dokumen <i>Outline Business Case</i> (OBC) Proyek Sektor Jalan dan Jembatan	506.794.000	492.717.000	97,22	98,00
9	Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.259.090.000	1.172.023.000	93,08	94,00
10	Penyusunan Dokumen <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam Bintan	591.051.000	566.343.000	95,82	96,00
11	Penyusunan Dokumen <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Jembatan Tol Maminasata	602.306.000	585.232.000	97,17	98,00
12	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	982.817.000	969.964.000	98,69	99,00
13	Penyiapan Dukungan Pemerintah Bagi Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.131.866.000	1.072.599.000	94,76	95,00
B	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.518.947.000	2.038.189.000	97,06	100

NO	OUTPUT/IKK/PAKET KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	683.163.000	540.673.000	79,14	80,00
2	Fasilitasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	800.000.000	751.815.000	93,98	94,00
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	511.920.000	451.503.000	88,20	89,00
4	Fasilitasi Pelaksanaan <i>Financial Close</i> Pengadaan Badan Usaha Proyek Infrastruktur Jalan dan Jembatan	723.864.000	693.037.000	95,74	96,00
5	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan Non Tol	800.000.000	630.928.000	78,87	79,00
C	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.498.915.000	3.088.401.000	88,27	88,87
1	Pemantauan Tahapan Perencanaan, Penyiapan, Transaksi dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	881.830.000	797.312.000	90,42	91,00
2	Penyusunan Pedoman Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol yang Terintegritas Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	800.000.000	730.625.000	91,33	92,00
3	Evaluasi Tahapan Perencanaan, Penyiapan, Transaksi dan Pelaksanaan KPBU Jalan dan Jembatan	817.085.000	717.612.000	87,83	88,00
4	Pemetaan Manajemen Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan	800.000.000	648.193.000	81,02	82,00
5	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	200.000.000	194.660.000	97,33	98,00
D	Layanan Perkantoran	1.000.000.000	969.413.000	96,93	97,00
1	Operasional Direktorat	1.000.000.000	969.413.000	96,93	97,00

Sumber Data : emonitoring.pu.go.id

4.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan

Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25 Sandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja TA. 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	% Capaian Target
1.	Penyiapan dan kerja sama investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	1) Jumlah dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		2) Jumlah dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
		3) Jumlah dokumen Outline Business Case (OBC) proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		4) Jumlah dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		5) Jumlah dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		6) Jumlah pengusaha dukungan dan jaminan pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	% Capaian Target
		bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.			
		7) Jumlah dukungan pemerintah bagi proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Dokumen	1 Dokumen	38,46%
2.	Pelaksanaan investasi infrastruktur jalan dan jembatan.	1) Terlaksananya Market Sounding proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100 %
		2) Jumlah fasilitasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.	1 Paket	1 Paket	100 %
		3) Jumlah laporan penanganan tanggap darurat bencana COVID-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	1 Paket	1 Paket	100 %
		4) Jumlah fasilitasi pelaksanaan Financial Close pengadaan Badan Usaha	1 Paket	1 Paket	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	% Capaian Target
		Proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.			
		5) Jumlah pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.	1 Paket	1 Paket	100 %
3.	Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur jalan dan jembatan	1) Jumlah laporan pemantauan tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		2) Jumlah pedoman kegiatan pengusahaan jalan tol yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		3) Jumlah laporan evaluasi tahapan perencanaan, penyiapan dan transaksi pelaksanaan proyek KPBU jalan dan jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		4) Jumlah dokumen Pemetaan Manajemen	1 Laporan	1 Laporan	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	% Capaian Target
		Resiko Proyek KPBU On Going Sektor Jalan dan Jembatan			
		5) Jumlah Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.	1 Laporan	1 Laporan	100 %
4.	Layanan Perkantoran	1) Jumlah layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %

Sumber Data : emonitoring.pu.go.id

Jika dilihat dari perbandingan target dan capaian kinerja, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, seluruh indikator kinerja yang dapat mencapai target.

Seluruh indikator kinerja mengalami kendala yang disebabkan oleh pandemic COVID-19 dimana bergesernya metode pelaksanaan kegiatan seperti rapat dari tatap muka menjadi Sebagian besar virtual. Pemberlakuan kebijakan *work from home* juga berpengaruh pada proses pencapaian *output* dimana pada beberapa waktu, beberapa staf terpapar COVID-19 yang mengakibatkan terganggunya produktivitas dalam pekerjaan.

4.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ORGANISASI

Selama 5 (lima) tahun berjalan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah menjalankan program pembinaan sistem Pembiayaan perumahan. Berikut adalah perbandingan anggaran dan kinerja penyerapan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020:



Gambar 4.18 Grafik Perbandingan Kinerja Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2015-2020

Pada tahun 2015, realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar 72% yaitu sebesar Rp 8.148.396.300,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 11.285.587.000,00. Realisasi sedikit terhambat dikarenakan kegiatan di lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan baru dimulai pada Bulan Juli 2015, sehingga Direktorat BSPP hanya memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan kurang lebih 6 (enam) bulan di tahun 2015.

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95% yaitu sebesar Rp 11.693.307.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 12.245.155.000,00. Melihat kinerja dari tahun 2015, peningkatan realisasi di tahun 2016 terlihat cukup signifikan dengan kenaikan dari 72% (pada tahun 2015) menjadi 95% (pada tahun 2016). Pencapaian realisasi di tahun 2016 ini termasuk baik. Hal ini sebagian besar dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan dapat berjalan sesuai rencana.

Pada tahun 2017, realisasi anggaran tahun 2017 Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan sampai tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.12.287.000.000,- atau tercapai sebesar 98,01% dari total Pagu Anggaran sebesar Rp.12.536.227.000.-. Sementara penyerapan anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan berdasarkan data e-

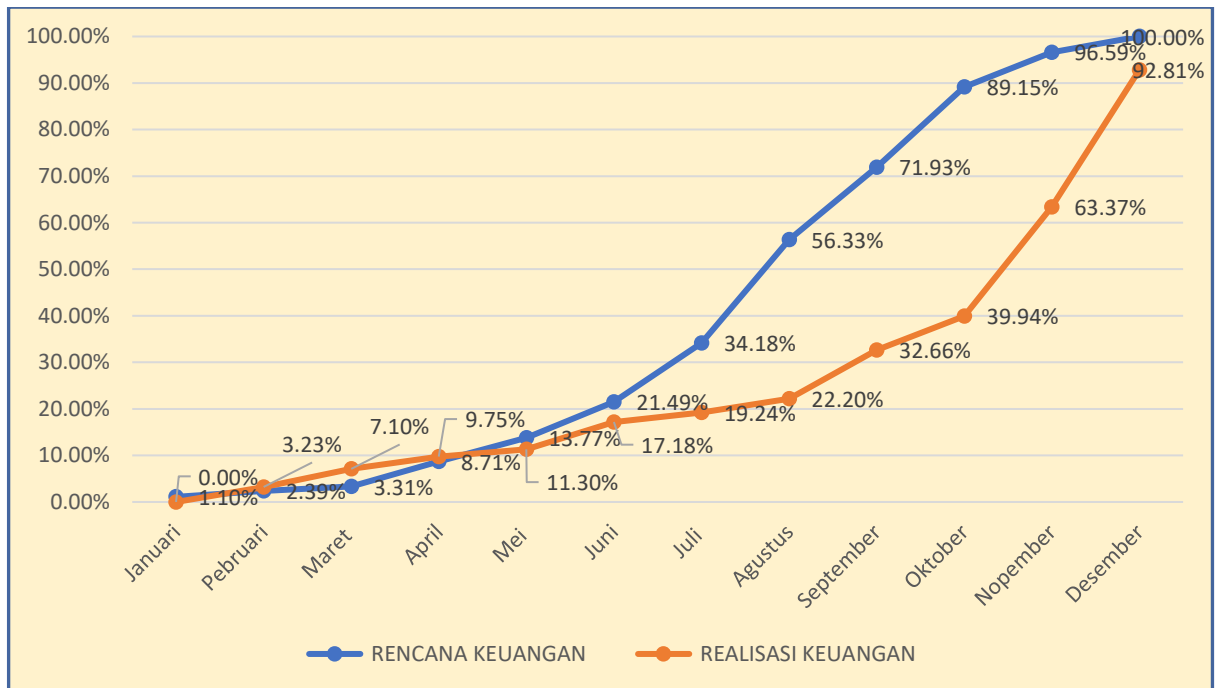
monitoring tanggal 19 Januari 2017, realisasi penyerapan dana Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan mencapai 80,7% yaitu terdapat penyerapan sebesar 13.195.135.000,- dari total anggaran sebesar Rp.16.300.000.000,- dengan realisasi progres penyerapan fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,8% yaitu sebesar Rp 11.766.056.688,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 11.790.043.000,00. Melihat kinerja dari tahun 2018, peningkatan realisasi di tahun 2018 termasuk baik. Hal ini sebagian besar dikarenakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun dalam berjalannya kegiatan Direktorat BSPP selama tahun 2018 terdapat beberapa hambatan, namun dapat diatasi dengan berbagai cara untuk tetap dapat mencapai target Direktorat BSPP.

Pada tahun 2019, terjadi sedikit penurunan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,92% yaitu sebesar Rp 13.149.226.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00. Realisasi sedikit terhambat dikarenakan kegiatan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan baru dimulai pada Bulan Juli 2020, sehingga Direktorat BSPP hanya memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan kurang lebih 6 (enam) bulan di tahun 2019.

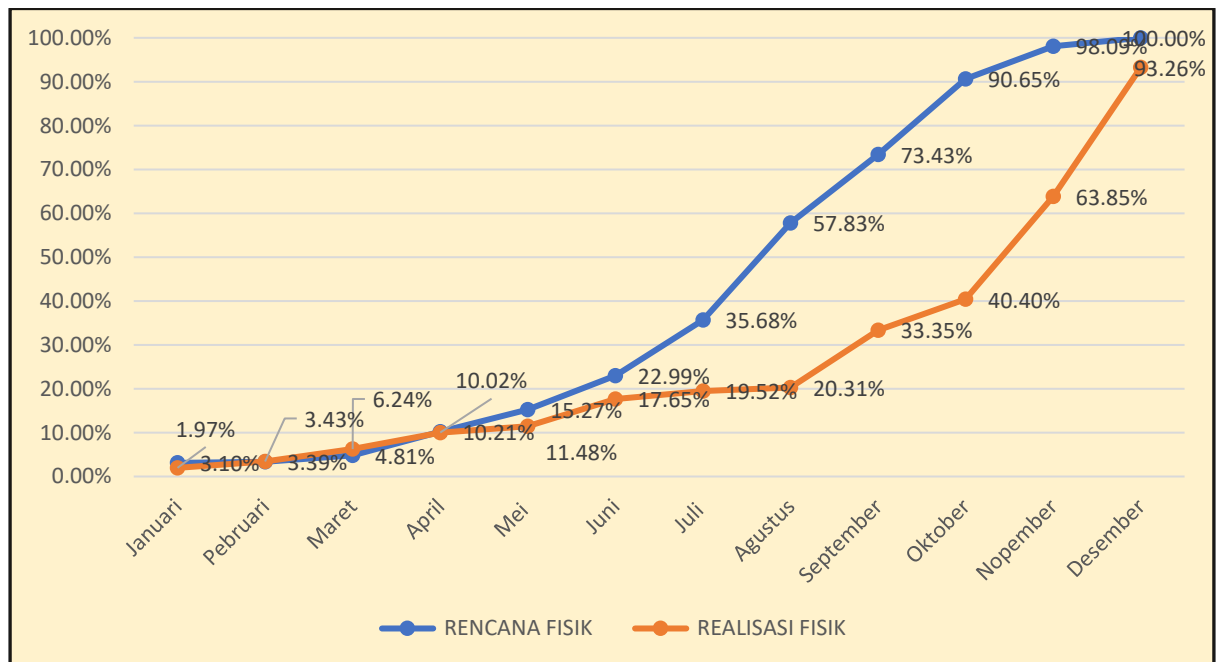
Pada tahun 2020, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp 15.938.560.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 17.172.517.000,00. Realisasi sedikit terhambat akibat pandemi COVID-19 yang terjadi dari bulan Maret dan masih berlangsung hingga laporan ini disusun.

4.5 REALISASI ANGGARAN



Gambar 4.20 Grafik Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2020

Realisasi penyerapan keuangan tahun anggaran 2020 adalah sebesar 92.81% dari target rencana yaitu 100%. Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi tahun anggaran 2020 belum mencapai target.



Gambar 4.21 Grafik Realisasi Fisik Direktorat PPIJJ Tahun 2020

Realisasi fisik pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 93,26% dengan target rencana sebesar 100%. Berdasarkan Gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi tahun anggaran 2020 belum mencapai target.

BAB V

PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

Secara total anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp 17.172.517.000,- dan realisasi penyerapan keuangan selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp 15.938.560.000,- atau 92,81%, dari target rencana sebesar Rp 17.172.517.000,- atau 100% sedangkan realisasi fisik sebesar 93,26% dengan target rencana yaitu 100% ini menjelaskan bahwa realisasi keuangan dan fisik pada tahun anggaran 2020 belum mencapai target.

Terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2020, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 maka dengan berlakunya Kebijakan Pemerintah tersebut dalam penanganan pandemi covid- 19 tentunya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan perlu melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar direktorat maupun di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5.2 LANGKAH KEDEPAN

Agar dapat mencapai target keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan setiap bulannya perlu dilakukan beberapa hal antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan rekomendasi di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih

berkualitas (*spending better*), maka langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020 yang perlu dilakukan adalah :

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, antara lain dengan:
 - a. Segera melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/ kegiatan pada kementerian/ Lembaga yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
 - b. Segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme revisi DIPA, apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA, misalnya “tanda blokir”.
 - c. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia dan mencukupi.
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Mengantisipasi pagu minus.
5. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
6. Penyiapan SOP untuk menjaga konsistensi kinerja atau kondisi tertentu, dan lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas tertentu dan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi pelaksana.
7. Penyelesaian regulasi yang berkaitan dengan tusi sehingga dapat memperjelas tanggung jawab Direktorat PPIJJ.

Agar dapat mencapai target keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan setiap bulannya perlu dilakukan beberapa hal antara lain melaksanakan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian melakukan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi

atas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan rekomendasi di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*), maka langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020 yang perlu dilakukan adalah :

- a. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, antara lain dengan:
 - Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - Segera melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Kemenkeu sesuai dengan kewenangannya.
 - Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
- c. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.